

Deradikalisasi Agama melalui Internalisasi Nilai Moderasi Beragama: Studi pada Kementerian Agama Kota Cirebon

Muhammad Syahrul Azzahra¹

¹UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon; syahrulmuhammad0707@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:
*religious radicalism;
deradicalization;
religious tolerance.*

ABSTRACT

Religious radicalism in Indonesia has emerged as an urgent issue in recent years, influenced by various political, social, economic, and religious factors. Although Indonesia is known for its diversity, the increase in radical activities is highly concerning. Key factors contributing to the spread of radicalism include political instability, social conflict, economic inequality, and religious extremism. The rapid dissemination of radical ideologies through social media and the internet further exacerbates the problem. Cirebon, a city in West Java, mirrors national trends with its own specific challenges. Political dissatisfaction, economic disparity, and radical religious teachings contribute to this issue. The Ministry of Religious Affairs (Kemenag) in Cirebon plays a crucial role in carrying out religious deradicalization through programs that promote moderation and religious tolerance. Kemenag's initiatives include interfaith dialogue, religious education reform, and close collaboration with law enforcement. These efforts aim to counter radical influences and foster a peaceful and diverse society. Despite the challenges, Kemenag's proactive measures and local-global collaboration are essential in mitigating the impacts of radicalism, ensuring security, and promoting social stability.

PENDAHULUAN

Radikalisme di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang menarik perhatian banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini memiliki akar yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, dan agama. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara dengan masyarakat yang beragam budaya dan agama, namun, dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi peningkatan aktivitas radikal yang mengkhawatirkan. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penyebaran radikalisme di Indonesia adalah ketidakstabilan politik dan konflik sosial yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Krisis politik, kebijakan kontroversial, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah telah menciptakan celah bagi kelompok-kelompok radikal untuk merekrut dan memperluas pengaruh mereka (Hafid, 2020).

Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi juga merupakan faktor penting yang memengaruhi penyebaran radikalisme. Ketidakadilan sosial dan ekonomi dapat menciptakan rasa frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru. Aspek agama juga memainkan peran penting dalam penyebaran radikalisme di Indonesia. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia menganut Islam yang moderat, namun ada kelompok-kelompok kecil yang mempraktikkan ajaran yang lebih radikal dan ekstrem. Faktor-faktor seperti ketidakpahaman terhadap ajaran agama, penyebaran ideologi radikal melalui media sosial, dan pengaruh kelompok-kelompok ekstrem internasional telah menyebabkan bertambahnya jumlah individu yang terpengaruh oleh paham radikal. Selain itu, penyebaran radikalisme di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor global seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dan internet memungkinkan ideologi radikal untuk disebar dengan cepat dan efisien, bahkan ke pelosok-pelosok desa yang terpencil (Hutabarat, 2023).

Cirebon, sebuah kota yang terletak di provinsi Jawa Barat, Indonesia, memiliki sejarah yang kaya dan keberagaman budaya yang unik. Namun, seperti banyak daerah lain di Indonesia, Cirebon juga tidak luput dari tantangan radikalisme yang menjadi isu serius dalam beberapa tahun terakhir. Faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran radikalisme di Cirebon tidak jauh berbeda dengan faktor-faktor yang ada di tempat lain di Indonesia. Salah satu faktor utama adalah ketidakstabilan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Meskipun Cirebon telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun masih ada disparitas ekonomi yang mencolok antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok-kelompok sosial tertentu. Selain itu, isu-isu politik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah juga menjadi pemicu penyebaran radikalisme di Cirebon. Ketidakkampuan pemerintah dalam menangani masalah-masalah seperti korupsi, pengangguran, dan ketidakadilan sosial telah menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk merekrut anggota baru. Aspek agama juga memainkan peran penting dalam dinamika radikalisme di Cirebon. Meskipun mayoritas penduduk Cirebon menganut Islam yang moderat, namun ada kelompok-kelompok kecil yang mempraktikkan ajaran yang lebih radikal dan ekstrem.

Faktor-faktor seperti ketidakpahaman terhadap ajaran agama, penyebaran ideologi radikal melalui ceramah-ceramah di masjid atau lembaga pendidikan agama, serta pengaruh dari kelompok-kelompok ekstrem luar negeri, telah menyebabkan bertambahnya jumlah individu yang terpengaruh oleh paham radikal di Cirebon. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memainkan peran penting dalam penyebaran radikalisme di Cirebon. Penggunaan media sosial

dan internet telah memungkinkan ideologi radikal untuk disebarakan dengan cepat dan luas, terutama di kalangan generasi muda yang sangat terhubung dengan teknologi (Muradi & Akbar, 2019).

Dengan demikian, radikalisme di Cirebon bukanlah masalah yang bisa diabaikan. Diperlukan langkah-langkah preventif dan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat sipil, untuk mengatasi fenomena ini dan mencegahnya agar tidak merusak keamanan dan stabilitas sosial di Cirebon. Dalam menghadapi ketegangan dan kekhawatiran yang melingkupi isu radikalisme di Cirebon, peran Kementerian Agama (Kemenag) memiliki arti penting dalam menenangkan keresahan masyarakat. Kemenag Cirebon menekankan perlunya menjaga kerukunan antar umat beragama dengan mengawal hak-hak keagamaan semua warga. Melalui serangkaian program dialog antaragama, pelatihan kerukunan beragama, dan pengawasan terhadap potensi intoleransi, Kemenag berupaya mencegah munculnya konflik yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal. Di samping itu, Kemenag Cirebon juga berfokus pada penguatan pendidikan agama yang moderat. Dengan memperkuat kurikulum yang seimbang dan memberdayakan para guru agama, Kemenag berusaha memperkenalkan nilai-nilai toleransi dan kedamaian kepada generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi penjaga keberagaman dan penolak radikalisme di masa depan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian yang terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu wawancara dan studi literatur. Pendekatan wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kota Cirebon, yang merupakan narasumber kunci dalam memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran dan upaya KEMENAG dalam mengatasi radikalisme di Kota Cirebon. Metode wawancara ini merupakan proses komunikasi yang berlangsung secara interaktif, memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendapatkan jawaban yang detail dan berbobot dari narasumber (Mudjia, 2011). Sementara itu, studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi, guna mendukung analisis dan pemahaman lebih lanjut terhadap konteks dan kerangka kerja yang relevan dalam mengatasi radikalisme. Kombinasi antara wawancara dan studi literatur diharapkan dapat memberikan perspektif yang holistik dan mendalam dalam menggambarkan peran serta upaya KEMENAG Cirebon dalam konteks penanganan radikalisme di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Munculnya Radikalisme Di Indonesia dan Kota Cirebon

Sejarah radikalisme di Indonesia memang memiliki akar yang panjang dan kompleks. Fenomena ini mulai muncul setelah masa kemerdekaan dan era reformasi, dengan titik awal yang tercatat pada tahun 1950-an, ketika operasi-operasi yang mengatasnamakan agama dilakukan di bawah Darul Islam (DI). Meskipun upaya tersebut berhasil digagalkan pada saat itu, namun radikalisme kembali muncul pada awal pemerintahan Presiden Soeharto (Hutabarat, 2023). Pada tahun 1976, kelompok Komando Jihad melakukan serangkaian ledakan di tempat ibadah, yang kemudian diikuti oleh aksi serupa yang dilakukan oleh Front Pembebasan Muslim Indonesia sekitar setahun setelahnya. Setelah rezim Soeharto berakhir, kelompok-kelompok radikal mulai menunjukkan keberanian mereka dengan menjadi lebih vokal dan militan. Pasca reformasi, tokoh-tokoh seperti Noordin M. Top dan Dr. Azhari memimpin gerakan radikal yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang menarik adalah perubahan tujuan gerakan radikalisme dari masa ke masa. Jika sebelumnya fokusnya mungkin lebih pada kepentingan lokal atau politik, saat ini gerakan radikalisme cenderung mengadvokasi ide-ide seperti kekhalifahan Islam, negara Islam Indonesia, dan penerapan syariat Islam di Tanah Air. Semua ini mencerminkan kompleksitas dan evolusi gerakan radikalisme di Indonesia sepanjang sejarahnya (Rozi, 2019).

Dalam konteks sejarah dan perkembangan radikalisme di Kota Cirebon, kita dapat melihat bahwa fenomena ini memiliki akar yang kompleks dan panjang. Radikalisme mulai muncul setelah masa kemerdekaan dan periode reformasi, dengan insiden-insiden mencolok seperti operasi Darul Islam pada tahun 1950-an dan kelompok Komando Jihad pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Setelah era reformasi, kelompok-kelompok radikal menjadi lebih terang-terangan dan militan, dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Noordin M. Top dan Dr. Azhari, dengan tujuan-tujuan seperti mendirikan kekhalifahan Islam, negara Islam Indonesia, dan menerapkan syariat Islam di Tanah Air. Kota Cirebon khususnya menjadi sorotan karena dianggap sebagai zona merah radikalisme, dengan penyebaran paham radikal yang cukup signifikan (Saumantri, 2024).

Tindakan tegas dari aparat keamanan, seperti yang dilakukan oleh Densus 99 Antiteror pada tahun 2019, menunjukkan seriusnya masalah ini. Bahkan, sejumlah individu di wilayah tersebut telah ditangkap karena keterlibatan dalam aksi teror di berbagai daerah sejak tahun 2012. Salah satu pendekatan yang diusulkan untuk mengatasi penyebaran radikalisme adalah melalui pendekatan moderasi beragama.

Konsep ini mengajarkan umat beragama untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh toleransi dan kedamaian, tanpa melenceng ke arah ekstremisme (MUKTARUDIN, 2024). Moderasi beragama di Indonesia, khususnya di kalangan Muslim Indonesia, diartikan berdasarkan konsep dan kebijakan moderasi beragama oleh Kementerian Agama Indonesia. Kementerian Agama menggambarkan karakteristik individu yang menerapkan moderasi beragama, yaitu jika mereka menunjukkan toleransi beragama, komitmen nasional, dan mengakomodasi budaya lokal. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan sikap publik yang moderat dan tidak ekstrem dalam memahami agama serta tidak memuliakan pemikiran bebas tanpa batas dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai dalam keragaman di Indonesia (Subchi, Zulkifli, Latifa, & Sa'diyah, 2022).

Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan dinamika radikalisme di Indonesia, serta langkah-langkah pencegahan yang diambil di Kota Cirebon, kita dapat melihat betapa pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas negara dari ancaman radikalisme. Langkah-langkah preventif dan pendekatan moderasi beragama menjadi kunci dalam menjaga kedamaian dan keberagaman di masyarakat.

Deradikalisasi Agama Melalui Moderasi Beragama

Radikalisme merupakan suatu paham atau aliran yang didorong oleh keinginan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara yang ekstrem dan radikal. Dalam banyak kasus, radikalisme ditandai dengan pendekatan yang mengedepankan kekerasan atau tindakan drastis sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, radikalisme sering kali menempuh jalan yang ekstrem dan tidak konvensional dalam upaya mencapai transformasi sosial dan politik yang diinginkan (Thoyyib, 2018). Radikalisme terjadi dimana-mana termasuk di wilayah Cirebon, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kota Cirebon, terlihat jelas bahwa peran Kementerian Agama (Kemenag) di Cirebon dalam upaya deradikalisasi memiliki dimensi yang sangat penting dan kompleks.

Salah satu upaya itu adalah program moderasi beragama yang dijalankan oleh Kemenag menjadi salah satu strategi utama dalam menanggapi isu radikalisme yang mengancam keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, moderasi beragama tidak hanya sekadar menjadi respons terhadap kasus-kasus radikalisme yang pernah terjadi di Cirebon, seperti peledakan pada tahun 2011 dan penangkapan terduga teroris pada tahun 2019, tetapi juga merupakan langkah preventif yang proaktif untuk mereduksi potensi radikalisme di masa depan. Upaya deradikalisasi agama melalui penanganan yang terus-menerus dilakukan oleh

Kemenag merupakan bukti komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan dan kedamaian masyarakat. Dalam melaksanakan program moderasi beragama, Kemenag Cirebon tidak hanya fokus pada aspek keagamaan semata, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial, budaya, dan politik yang melingkupi isu radikalisme.

Pemahaman bahwa radikalisme merupakan bentuk ekstremisme yang mengancam kerukunan dan keberagaman masyarakat menjadi landasan utama dalam merancang strategi moderasi beragama (Rahmawati, Astuti, Harun, & Rofiq, 2023). Pentingnya memahami konteks lokal juga terlihat dalam penanganan kelompok-kelompok salafi di Cirebon. Meskipun tidak semua kelompok salafi terlibat dalam aktivitas radikal, namun adanya potensi bahwa sebagian dari mereka dapat terlibat dalam pemahaman radikalisme menjadi perhatian serius bagi Kemenag. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan, pemantauan, dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok tersebut menjadi bagian integral dari upaya Kemenag dalam menanggulangi radikalisme.

Moderasi agama sendiri merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan keseimbangan dalam menjalankan keyakinan dan prinsip-prinsip agama. Konsep ini menekankan pentingnya menjalankan ajaran agama tanpa ekstremisme atau kelebihan, serta mendorong sikap toleransi dan penghargaan terhadap keragaman pemahaman dan pandangan dalam agama. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk menghormati perbedaan, memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip toleransi dan kerukunan. Kesederhanaan dan kedamaian dalam beragama menjadi kunci utama dalam menerapkan konsep moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari (Nurdin, 2021).

Latar belakang lahirnya moderasi beragama di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi masyarakat majemuk, tantangan ekstremisme, tradisi keberagaman Nusantara, dan peran pemerintah serta lembaga agama. Dalam upaya menghadapi radikalisme, moderasi beragama bukan hanya tentang menjaga keseimbangan keyakinan, tetapi juga memperkuat toleransi, menghindari ekstremisme, dan membangun kerukunan antarumat beragama. Ini adalah jalan tengah yang menghormati perbedaan dan memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan Bersama (Akhmadi, 2019).

Maka dari itu kemenag kota Cirebon mengsungkan program moderasi beragama sebab kemenag melihat adanya efektivitas dari moderasi beragama dalam menangani kasus radikalisme. Kerjasama lintas lembaga antara Kemenag dengan lembaga penegak hukum, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88, juga memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pencegahan radikalisme. Pendekatan persuasif yang digunakan untuk merubah pemahaman

ekstrem menjadi moderat menunjukkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam menanggulangi radikalisme. Selain itu, apresiasi dan dukungan dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Mesir, terhadap program moderasi beragama yang dilakukan oleh Kemenag Cirebon menegaskan pentingnya upaya lokal dalam konteks global dalam mengatasi radikalisme. Ini juga menunjukkan bahwa isu radikalisme bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, tetapi juga menjadi perhatian bersama bagi komunitas internasional. Sehingga, peran Kementerian Agama (Kemenag) di Cirebon dalam mengatasi radikalisme tidak hanya merupakan tanggung jawab lokal, tetapi juga merupakan kontribusi yang berarti dalam mempromosikan perdamaian, toleransi, dan keberagaman di tingkat nasional dan internasional. Upaya yang terus dilakukan oleh Kemenag Cirebon dalam memperkuat moderasi beragama sebagai benteng utama melawan radikalisme adalah langkah yang patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak yang peduli akan keamanan dan kedamaian bersama.

Dalam penguatan moderasi beragama yang diadakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) kota Cirebon memiliki turunan yang meluas yang menjadi program kerja yang strategis yakni mulai dari deklarasi anti radikalisme dan terorisme yang disuarakan oleh Bupati Cirebon bersama Forkopimda, hingga workshop moderasi beragama yang diadakan oleh Kemenag RI bekerja sama dengan Yayasan Lentera Muda Indonesia untuk mahasiswa. Festival multikultural yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI juga menjadi sarana untuk mempersatukan tokoh agama di Cirebon melalui budaya lokal. Selain itu, rapat koordinasi dan sosialisasi yang digelar oleh Kantor Kemenag Kota Cirebon serta paparan urgensi moderasi beragama dari Bupati dan Kepala Kankemenag turut menjadi langkah penting dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya moderasi beragama untuk menciptakan perdamaian hidup beragama. Semua program ini merupakan upaya konkret untuk membangun toleransi, mengurangi radikalisme, dan memperkuat kerukunan antar umat beragama di Cirebon.

Keberhasilan Dan Tantangan

Kementerian Agama (Kemenag) menunjukkan komitmen yang sangat serius dalam mengatasi isu radikalisme di Cirebon dengan berbagai langkah proaktif yang mereka lakukan. Salah satu fokus utama mereka adalah pada penanganan isu radikalisme di lembaga pendidikan. Kemenag telah mengambil langkah-langkah yang sangat berarti dalam membedakan antara pendidikan agama yang sehat dan upaya rekrutmen ke arah radikalisme (Arhanuddin Salim, 2023). Mereka menekankan bahwa kurikulum agama yang diajarkan di sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keberagaman, serta tidak boleh mengajarkan radikalisme agama. Selain itu, melalui studi kasus tentang organisasi

GARDAH di Kota Cirebon, Kemenag telah menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk menangani kasus-kasus seperti pemurtadan, perjudian, peredaran minuman keras, dan aliran sesat.

Langkah kedua yang diambil adalah dalam upaya mempromosikan moderasi beragama. Bupati Kabupaten Cirebon dan Kepala Kankemenag telah menyoroti pentingnya moderasi beragama sebagai solusi untuk menangkal penyebaran paham radikal, terutama di wilayah Cirebon. Namun, Kemenag juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang sangat kompleks. Wilayah Cirebon dikategorikan sebagai zona merah radikalisme, yang menimbulkan kekhawatiran terutama terhadap generasi muda, termasuk mahasiswa, yang dianggap sebagai penerus masa depan.

Tantangan lainnya adalah pengaruh sosiokultural di Cirebon yang memerlukan pendekatan khusus, mengingat perbedaan konteks dengan Madinah pada zaman Nabi Muhammad Saw. Selain itu, pemahaman agama yang dangkal dan semangat keagamaan yang tinggi juga menjadi faktor yang mempersulit upaya penanggulangan radikalisme. Meskipun dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks, Kemenag terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempromosikan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama sebagai solusi jangka panjang. Dengan langkah-langkah proaktif yang mereka ambil dan kerjasama lintas sektor, diharapkan upaya tersebut dapat mengurangi dampak radikalisme di wilayah Cirebon dan mewujudkan masyarakat yang lebih harmonis, sejahtera, dan damai.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengeksplorasi peran dan upaya Kementerian Agama (Kemenag) Cirebon dalam mengatasi radikalisme di wilayah Cirebon. Berdasarkan kajian literatur dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa Kemenag Cirebon memiliki peran yang sangat strategis dalam memerangi radikalisme melalui berbagai program pendidikan agama yang moderat dan inklusif, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga dan komunitas lokal. Faktor ekonomi, sosial, dan keagamaan merupakan pendorong utama radikalisme di Cirebon. Ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial menciptakan rasa frustrasi yang sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama yang benar dan penyebaran ideologi radikal melalui media sosial juga berkontribusi terhadap masalah ini.

Kemenag Cirebon telah mengimplementasikan berbagai program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi yang berfokus pada rehabilitasi individu yang teradikalisasi serta pencegahan penyebaran ideologi radikal. Program ini melibatkan pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan nilai-nilai sosial. Pendidikan non-formal di Cirebon memainkan peran penting dalam pencegahan radikalisme,

menyediakan layanan yang mendukung pendidikan formal dan membantu mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Selain itu, Cirebon sebagai kota dengan sejarah panjang dalam penyebaran Islam memiliki budaya religius yang kuat. Peran tajug (tempat ibadah) dan pendidikan agama di Cirebon sangat penting dalam membentuk karakter masyarakat yang toleran dan menjauhkan mereka dari pengaruh radikalisme.

Secara keseluruhan, upaya Kemenag Cirebon dalam mengatasi radikalisme telah menunjukkan hasil yang positif. Namun, tantangan tetap ada, dan diperlukan kerjasama yang terus-menerus antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa radikalisme dapat dicegah dan dikurangi secara efektif. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program-program yang ada dan mengembangkan strategi baru yang lebih inovatif dalam menghadapi ancaman radikalisme di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- Arhanuddin Salim. (2023). MODERASI BERAGAMA Implementasi Dalam Pendidikan, Agama dan Budaya Lokal Penulis: *Rumah Moderasi Beragama (Rmb) Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (Lp2M) Iain Manado*, 1–4. Retrieved from <https://philpapers.org/rec/ISMMBI>
- Hafid, W. (2020). Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v1i1.37>
- Hutabarat, F. (2023). Navigating Diversity: Exploring Religious Pluralism and Social Harmony in Indonesian Society. *European Journal of Theology and Philosophy*, 3(6), 6–13. <https://doi.org/10.24018/theology.2023.3.6.125>
- MUKTARUDIN, M. (2024). *Penyitaan Dana Kotak Amal sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peruntukannya Pasca Putusan Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 981/Pid. Sus/2021/PN Jkt. Tim)*. Universitas Malikussaleh.
- Muradi, & Akbar, I. (2019). Strategy of Cirebon city to prevent radicalism: An ethnographic study of the non-formal education system. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 8(4), 248–260.
- Nuridin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 18(1), 59. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>
- Prof. Dr. H. Mudjia, R. M. S. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Animal Genetics*, 39(5), 1–4.
- Rahmawati, A., Astuti, D. M., Harun, F. H., & Rofiq, M. K. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KALANGAN GEN-Z. J-

- ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(5), 905–920.
<https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i5.6495>
- Rozi, S. (2019). *Politik identitas : problematika dan paradigma solusi keetnisan versus keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua*. Bumi Aksara. Retrieved from https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8IU_EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=politik+identitas+politik+identitas&ots=lJCQH6bbZx&sig=KGXxTyNTBD0hLDi5BZwc_txunjY
- Saumantri, T. (2024). Pendampingan Masyarakat Dalam Upaya Menangkal Radikalisme dan Terorisme di Masjid Al-Jama'ah Komplek Bima Estate Kota Cirebon. *Abdi Makarti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–33.
- Subchi, I., Zulkifli, Z., Latifa, R., & Sa'diyah, S. (2022). Religious Moderation in Indonesian Muslims. *Religions*, 13(5), 451.
<https://doi.org/10.3390/rel13050451>
- Thoyyib, M. (2018). Radikalisme Islam Indonesia. *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(1), 90–105. <https://doi.org/10.52166/talim.v1i1.636>